

**MODEL PENDIDIKAN PESANTREN YANG TOLERAN DAN INKLUSIF BERBASIS  
CULTURE OF PEACE EDUCATION SEBAGAI UPAYA  
MENGIKIS RADIKALISME ATAS NAMA AGAMA**

Yusuf Hanafi

Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

*E-mail: sufi\_rmi@yahoo.com*

**Abstrak:** Karakter otentik pesantren Indonesia, khususnya pesantren tradisional, adalah sangat toleran, kaya dengan kearifan lokal, dan jauh dari budaya dan ideologi kekerasan. Ironisnya, kini pesantren mendapat stigma negatif sebagai lembaga yang mengajarkan ekstrimisme dan radikalisme, pasca terkuaknya fakta bahwa hampir seluruh aksi terorisme di Tanah Air dalam satu dasawarsa terakhir didalangi oleh orang-orang pesantren, khususnya yang berafiliasi ke Pesantren al-Mukmin Ngruki Solo pimpinan Abu Bakar Ba'asyir. Untuk menghilangkan stereotip tersebut, dibutuhkan ikhtiar *jama'i* yang serius guna menghidupkan kembali karakter pesantren yang *genuine* melalui revitalisasi budaya toleransi dan moderatisme ke dalam sistem pendidikannya. Selaras dengan itu, pesantren sejatinya sangat potensial dan strategis untuk ikut serta dalam program Pendidikan Budaya Damai (*Culture of Peace Education*) yang dicanangkan UNESCO sejak tahun 2001—di mana tujuannya adalah mewujudkan sistem pendidikan yang kondusif bagi pengajaran HAM, demokrasi, dan budaya damai di semua jenjang, baik formal maupun informal. Tulisan ini bertujuan untuk mengenalkan model pendidikan toleran dan inklusif berbasis konsep *Culture of Peace Education* untuk dunia pendidikan pesantren guna mengikis radikalisme atas nama agama yang *endemic* belakangan ini.

**Kata-kata kunci:**

Pendidikan Budaya Damai, *Culture of Peace Education*, radikalisme atas nama agama.

**Prolog**

Ketika belum hilang *shock* akibat rentetan teror dan aksi kekerasan berselubung doktrin jihad, khususnya dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2011, di tahun 2014 ini kita kembali dikejutkan oleh deklarasi-deklarasi dukungan kepada *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS—yang dikenal sangat radikal dan ganas) dan rekrutmen *mujahidin* untuk diberangkatkan berjihad ke Timur Tengah. Rentetan peristiwa di atas semakin membelalakkan mata kita bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi bahaya laten di negeri ini.

Sebelumnya, peristiwa-peristiwa kekerasan lain yang menjurus pada aksi radikalisme dan terorisme hampir tidak pernah sepi bahkan cukup mendominasi pemberitaan di media massa. Kekerasan demi kekerasan menjadi tontonan rutin dan diskusi hangat di televisi. Pelaku dan motifnya pun sangat beragam, mulai yang berlatar belakang agama, politik, ekonomi, sosial, etnik, olahraga, dan lain-lain. Namun yang menjadi sorotan dan perhatian utama, baik di tingkat nasional maupun internasional, adalah kekerasan yang bermotif ideologi agama.

Klimaksnya, pasca tragedi Bom Bali I, 12 Oktober 2002, media nasional dan internasional banyak menyorot keterkaitan pesantren dengan gerakan terorisme. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa semua pelaku teror tersebut adalah orang-orang pesantren. Trio bersaudara—Mukhlis, Amrozi, dan Ali Imron—adalah keluarga Pesantren al-Islam Lamongan Jawa Timur, di samping juga alumni Pesantren al-Mukmin Ngruki Solo. Pelaku-pelaku yang lain pun ternyata ada kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Pesantren al-Mukmin Ngruki pimpinan Abu Bakar Ba'asyir.

Temuan ini kemudian memunculkan stigma negatif terhadap dunia pesantren yang dianggap sebagai lembaga yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Pemerintah pun kemudian merekomendasikan untuk mengadakan pengawasan dan *sweeping* terhadap pesantren. Bahkan kala itu sempat muncul wacana pengambilan "sidik jari" bagi para santri pesantren, meski kemudian urung dilaksanakan setelah mendapat tentangan dari banyak pihak.

Tentu saja stigma tersebut ditolak oleh mayoritas pesantren di Indonesia, terutama pesantren yang berideologi moderat. Mereka pun kemudian, dalam berbagai forum dan media, mengkampanyekan bahwa *mainstream* pesantren di Indonesia adalah moderat dan anti-radikalisme. Pesantren yang berfaham radikal, seperti Ngruki dan jaringannya, hanyalah segelintir pesantren di antara tidak kurang dari 17.000 pesantren yang ada di Indonesia. Baru-baru ini, NU—sebagai induk organisasi dari sebagian besar pesantren di Indonesia—bersama 12 ormas Islam lainnya mendeklarasikan kesepakatan bersama menentang segala bentuk ekstrimisme dan radikalisme dengan mengatasnamakan agama. Mereka meminta pemerintah untuk memantau, mengevaluasi, serta bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok ataupun ormas-ormas yang bertingkah dan bertindak radikal, karena dianggap telah menodai citra dan substansi Islam itu sendiri (Republika, 06/08/2010).

Menghilangkan stigma negatif tersebut memang bukan persoalan mudah, butuh waktu dan ikhtiar kolektif yang sungguh-sungguh dari semua elemen pesantren untuk menghidupkan kembali dan merevitalisasi budaya toleransi, perdamaian, dan moderatisme dalam sistem pendidikannya. Sebagai institusi pendidikan yang *indigenous* di Indonesia yang telah berabad-abad berkontribusi membentuk watak dan karakter Muslim Indonesia, pesantren seharusnya berpotensi menjadi salah satu basis, baik secara diskursif maupun moral-praxis, dalam menangkal arus radikalisme Islam yang menjadi *endemic* saat ini. Sejalan dengan hal itu, Abd. Rahman Assegaf berpendapat bahwa penanaman nilai-nilai agama, termasuk di dalamnya melalui institusi pesantren, yang berwawasan HAM merupakan upaya preventif dalam menangani konflik dan kekerasan (Assegaf, 2004: 182).

Dalam konteks inilah, UNESCO pada tahun 2001 mencanangkan Pendidikan Damai (*Peace Education*) atau Pendidikan Budaya Damai (*Culture of Peace Education*). Program ini pertama kali dielaborasi oleh UNESCO pada saat Kongres Internasional tentang Perdamaian di Yarnoussoukro, Cote d'Ivoire pada 1989. Tujuan program tersebut adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang

komprehensif bagi HAM, demokrasi, dan budaya damai. Oleh UNESCO, program ini dijalankan untuk semua sistem pendidikan pada jenjang yang berbeda-beda, baik pendidikan formal maupun informal (Assegaf, 2004: 85-86).

Berpijak atas pemikiran dan analisis situasi tersebut di atas, tulisan konseptual ini menemukan ruang relevansi dan signifikansinya. Tulisan ini menggagas pendidikan pesantren berbasis toleransi dan multikulturalisme yang bercirikan: (1) keseimbangan antara pengajaran hukum Islam dengan legal formal; (2) pendidikan dakwah yang responsif dengan kondisi dan psikologi masyarakat; (3) pembinaan akhlak atau tasawuf yang dialektis dengan norma-norma masyarakat, dan (4) penanaman nilai-nilai humanitas dan HAM. Penulis meyakini, jika keempat karakteristik pendidikan berbasis toleransi dan multikulturalisme tersebut diadaptasi oleh pesantren-pesantren lain dalam kurikulum pendidikan maupun praktik pengajarannya, maka dunia pesantren akan melahirkan generasi-generasi Muslim yang moderat dan inklusif.

Sekali lagi, pesantren sejatinya sangat potensial dan strategis untuk ikut berperan-serta dalam program *Culture of Peace Education* yang dicanangkan UNESCO di atas. Sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pada pendidikan karakter dan moralitas, pesantren justru dapat menjadi pusat persemaian generasi-generasi Muslim yang cinta damai, moderat, dan anti kekerasan. Sebab, karakter otentik pesantren Indonesia, khususnya pesantren tradisional, adalah dikenal sangat ramah, toleran, berbaur dengan masyarakat, kaya dengan kearifan lokal, dan jauh dari budaya dan ideologi radikal. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam program *Culture of Peace Education*.

Tulisan ini ingin membuka mata publik perihal wajah pesantren Indonesia yang sesungguhnya. Stigma negatif yang didakwakan kepada pesantren sebagai sarang pembibitan teroris akan segera terkikis. Pesantren justru akan menjadi "juru bicara" Islam kepada dunia yang menegaskan secara lantang bahwa Islam adalah agama damai yang menentang segala bentuk radikalisme dan terorisme.

### **Akar dan Sejarah Radikalisme atas Nama Agama di Indonesia**

Radikalisme atas nama agama sebenarnya telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam studinya di Indonesia, India, dan Filipina, Stephen Frederic Dale menyebutkan bahwa pada masa penjajahan radikalisme atas nama agama di tiga negara tersebut diekspresikan dalam bentuk *jihad fi sabilillah* melawan pemerintahan kolonial (Dale, 1998: 51). Karena gerakan tersebut sesuai dengan agenda perjuangan kelompok-kelompok nasionalis lainnya, yakni berperang mengusir penjajah, maka gerakan radikalisme tersebut dipandang sebagai perjuangan yang luhur dan heroik (Purwoko, 2002: 33).

Setelah merdeka, riak-riak gerakan radikalisme agama mulai tampak, terutama dari kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam. Salah satu di antaranya yang terbesar adalah

gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Kelompok ini kemudian ditumpas oleh Pemerintahan Soekarno karena dianggap sebagai pemberontak negara. Demikian pula gerakan Darul Islam yang digelorkan oleh Daud Beureuh di Aceh yang kemudian berkembang menjadi kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Zada, 2002: 18). Meski karakter kelompok dan tipikal gerakannya sangat berbeda dengan kelompok-kelompok Islam radikal modern, namun falsafah dan tujuan gerakannya kurang lebih sama (Turmudi *et. al.*, 1995: 117).

Pada masa Orde Baru, dengan model pemerintahan yang militeristik dan pendekatan represifnya, gerakan radikalisme berlabel agama hampir tidak memiliki ruang bernafas. Dengan kekuatan militer yang kuat dan jaringan intelijen yang luas, Soeharto berhasil menumpas benih-benih kelompok tersebut sebelum dapat tumbuh dan berkembang.

Meski demikian, kelompok-kelompok Islam radikal ternyata masih tetap eksis. Terbukti, meski intensitasnya sangat minim, tercatat beberapa kali aksi-aksi radikalisme berbau agama terjadi. Seperti, kerusuhan Tanjung Priok pada tahun 1984, pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan Palembang-Medan pada tahun 1981 yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Komando Jihad, pemberontakan Warsidi tahun 1989, pemboman Candi Barobudur tahun 1985, dan lain-lain.

Frekuensi kekerasan dan radikalisme atas nama agama mengalami peningkatan yang sangat tajam pasca runtuhnya Orde Baru. Bahkan, menurut Asfar (2003: 45), jumlah kasusnya meningkat tiga kali lipat dibanding sebelumnya. Alam kebebasan seluas-luasnya yang disuguhkan oleh Era Reformasi memberikan ruang lebar bagi gerakan-gerakan radikal (Turmudi *et. al.*, 1995: 120). Sejak tahun 2000, ditandai dengan peledakan bom mobil di Kedubes Filipina, Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan bom malam Natal yang menewaskan belasan orang, aksi-aksi radikalisme yang menjurus pada terorisme terus terjadi. Puncaknya adalah bom Bali pada 12 Oktober 2002, tepat 1 tahun 1 bulan dan 1 hari dari pemboman menara kembar WTC di New York Amerika Serikat. Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian Kuta Bali menewaskan lebih dari 200 orang. Sejak peristiwa tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membasmi kelompok-kelompok teroris dan sel-selnya. Enam hari setelah peristiwa berdarah tersebut pemerintah mengeluarkan Perpu Anti-Terrorisme. Perpu tersebut tidak hanya mengancam pelaku teror dengan hukuman seberat-beratnya, namun juga memberikan kewenangan aparat sebesar-besarnya untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk menangkap orang-orang atau kelompok yang dicurigai atau berpotensi melakukan tindak terorisme (Maridjan dalam Asfar, *et. al.*, 2003: ix).

Namun upaya tersebut belum dapat menghentikan aksi-aksi terorisme. Terbukti setahun berikutnya, bom berhulu ledak tinggi menghancurkan Hotel JW Marriot Jakarta dan menewaskan belasan orang. Disusul

bom di kedubes Australia pada tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005, dan bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton di tahun 2009.

Gejala kebangkitan gerakan Islam radikal pada Era Reformasi, menurut Turmudi, sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1980-an. Hal itu ditandai dengan menguatnya kecenderungan fanatisme Islam di kalangan masyarakat. Simbol-simbol Islam semakin marak digunakan dalam berbagai kegiatan. Bahkan di ranah politik dan pemerintahan pun terjadi Islamisasi yang sangat kental. Pemerintah Orde Baru, dengan Politik Akomodasi-nya, merangkul kelompok-kelompok dan ormas-ormas Islam yang sebelumnya mereka tekan.

Gejala ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan global di negara-negara Islam. Pada akhir 1970-an, berkembang gelombang "Pan-Islamisme" atau "Revivalisme Islam". Gerakan yang bermula dari Mesir dengan tokoh sentralnya Muhammad Abduh dan Rashid Ridha ini kemudian menginspirasi belahan dunia Islam yang lain untuk bangkit dan melawan sekularisme dan ideologi Barat. Beberapa negara pada awal 1980-an bahkan telah menerapkan Syariat Islam sebagai dasar pemerintahan, seperti: Sudan, Mesir pada masa pemerintahan Anwar Sadat, Pakistan, dan lain-lain. Kelompok-kelompok Islam radikal di Timur Tengah pun bertumbuhan, seperti: Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di Yordania, Ba'ats di Syiria, Hamas di Palestina, dan lain-lain. Bahkan kelompok-kelompok yang pada masa awal sering juga disebut "Gerakan Islam Baru" (*New Islamic Movement*) tersebut kemudian berkembang melewati batas teritori negara, atau sering disebut dengan gerakan transnasional.

Jika ditarik garis diametral, maka dapat terlacak bahwa hampir semua organisasi-organisasi radikal di Indonesia adalah produk impor dari Timur Tengah. Lasykar Jihad, gerakan Tarbiyah, dan kelompok-kelompok Salafi lainnya, pemikiran dan metode gerakan mereka sangat dekat dengan Ikhwanul Muslimin. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara resmi merupakan cabang dari Hizbut Tahrir Internasional yang berpusat di Yordania. Sedang Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dalam penelitian Sidney Jones, disinyalir memiliki hubungan dengan Jama'ah Islamiyah (JI) di Asia Tenggara dan memiliki kontak dengan Tandhim al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden (Rahmat, 2005: 72).

### **Pesantren dan Radikalisme Agama**

Setelah peristiwa Bom Bali I (12 Oktober 2002), media nasional dan internasional banyak menyorot keterkaitan pesantren dengan gerakan terorisme. Pemicunya, seluruh pelaku teror tersebut adalah orang-orang pesantren. Trio *bombers*—Mukhlas, Amrozi, dan Ali Imron—adalah keluarga Pesantren al-Islam Lamongan Jawa Timur, di samping juga alumni Pesantren al-Mukmin Ngruki Solo. Pelaku-pelaku yang lain pun ternyata memiliki kaitan, baik secara langsung maupun tidak, dengan Pesantren al-Mukmin Ngruki pimpinan Abu Bakar Ba'asyir itu.

Media-media asing, terutama Australia yang *notabene* warganya menjadi korban terbanyak dalam tragedi bom Bali tersebut, secara tendensius juga mendakwa pesantren sebagai lembaga pendidikan teroris. Beberapa predikat miring yang menjurus pada terorisme disematkan media Australia terhadap pesantren. Peter Jean dalam sebuah artikelnya di *Associated Australian Press* menyebut pesantren sebagai *"breeding ground terrorist"* (Jean, 2003), Sian Powell dan Sandra Nahdar dalam *the Australian* terangkan memberikan peringatan untuk menjauhi pesantren dan menyebutnya *"terrorist-linked pesantren"* (Powell dan Nahdar, 2003), dan lain-lain.

Aroma kebencian dari media-media Australia terhadap pesantren sangat kuat terasa. Bahkan terjadi semacam *phobia* (ketakutan berlebihan) terhadap pesantren di Indonesia. *Daily Telegraph*, sebuah surat kabar yang sangat berpengaruh di Australia, dalam edisi 4 Oktober 2003 menuliskan:

*Australia may boost its funding of the Indonesian education system to try to stop students going to radical Islamic boarding schools—known breeding grounds for terrorism. The US is planning to sink \$250 million into Indonesian schools to stop students attending Islamic schools, called pesantren, which often preach hatred of the West. Australia may also boost the \$12 million it already gives. Several of the Bali bombers attended Islamic schools – as did their Jemaah Islamiyah figurehead, Abu Bakar Bashir (Daily Telegraph, 4/10/2003).*

Murray Gordon O'Hanlon, seorang peneliti muda Australia, pernah mengamati artikel-artikel tentang pesantren yang dimuat di berbagai media di Australia, terhitung sejak September 2003 hingga Maret 2005. Dari 54 artikel yang ditemukan, 49 di antaranya mengkonotasikan pesantren dengan gerakan terorisme.

Stigma tersebut semakin menguat ketika pelaku-pelaku teror bom selanjutnya sebagian besar pernah belajar di pesantren. Meski latar belakang kepesantrenan mereka hanya mengerucut pada Pesantren Ngruki dan jaringannya (seperti: Luqmanul Hakiem [Johor Malaysia], al-Islam [Tenggulun Lamongan], Darussyuhada [Boyolali], Ma'had 'Aly atau Universitas an-Nur [Solo], al-Husein [Indramayu], Yayasan Darussalam [Surabaya], dan al-Muttaqin [Jepara]), namun stigma tersebut terlanjur berlaku untuk semua pesantren di Indonesia (*International Crisis Group*, No.114/5 Mei 2006).

Stigmatisasi pesantren sebagai sarang dan biang radikalisme dan terorisme secara serampangan, seperti diuraikan di atas, selain tidak bijak, jelas tidak didasarkan data dan fakta yang akurat dan sah. Sepanjang sejarah, sejak pesantren mulai didirikan pada kurang lebih 6 abad silam, keterlibatan pesantren dalam aksi kekerasan dan radikalisme hanyalah pada masa revolusi. Aksi kekerasan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah. Saat itu banyak pesantren yang menjadi markas pejuang dan pusat pengkaderan dan latihan militer. Banyak pemimpin pesantren (kiai) juga bertindak sebagai komandan pasukan. Keterlibatan pesantren dalam revolusi tersebut terbukti telah memberikan andil yang sangat

besar bagi kemerdekaan Indonesia. Dan setelah merdeka, pesantren kembali pada *khittah* utamanya, yaitu pengajaran ilmu-ilmu agama Islam.

Karakter otentik pesantren, menurut Khamami Zada, justru jauh dari tradisi kekerasan. Sejak awal, *mainstream* pesantren sesungguhnya menampilkan wajahnya yang toleran dan damai. Di pelosok-pelosok pedesaan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, banyak ditemukan *performance* pesantren yang berhasil melakukan dialog dengan budaya masyarakat setempat. Pesantren-pesantren yang ada di Jawa, terutama yang bermazhab Syafi'i dan memiliki hubungan dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU), menampilkan sikap akomodasi yang seimbang dengan budaya setempat sehingga pesantren mengalami pembauran dengan masyarakat secara baik. Keberhasilan pesantren seperti ini kemudian menjadi model keberagaman yang toleran di kalangan umat Islam pada umumnya. Tak heran, jika karakter Islam di Indonesia seringkali dipersepsikan sebagai Muslim yang ramah dan damai (Zada, 2007).

Jika kemudian ada pesantren yang mengajarkan doktrin-doktrin ekstrimisme dan radikalisme, hal itu tak lain merupakan penyimpangan karakter pesantren Indonesia yang *genuine*. Memang, menurut Zada, dalam dekade belakangan ini terjadi polarisasi tipologi pesantren seiring dengan semakin berkembangnya berbagai macam aliran dan ideologi Islam di Indonesia. Pesantren bukan lagi milik tunggal kelompok tradisional. Hampir semua aliran Islam yang ada di Indonesia telah memiliki pesantren (Zada, 2007). Fenomena ini makin menguatkan pandangan Martin van Bruinessen bahwa pesantren sebagai institusi keagamaan yang memiliki *great tradition* (tradisi agung) untuk mentransmisikan Islam di Indonesia mengalami polarisasi ke dalam pola tradisional, modernis, reformis, dan fundamentalis mengikuti aliran-aliran Islam yang berkembang (Bruinessen, 1995:66). Namun yang jelas, jumlah pesantren yang berideologi fundamentalis, seperti Pesantren Ngruki dan jaringannya, hingga saat ini tergolong sangat sedikit.

### **Pendidikan Budaya Damai (*Culture of Peace Education*) melalui Pesantren**

Menghilangkan stigma negatif tersebut memang bukan persoalan gampang dan sepele, butuh waktu dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari semua elemen pesantren untuk menghidupkan kembali dan merevitalisasi budaya toleransi, perdamaian, dan moderatisme ke dalam sistem pendidikannya. Sebagai institusi pendidikan yang *indigenous* Indonesia, yang telah berabad-abad turut membentuk watak dan karakter Muslim Indonesia, pesantren seharusnya berpotensi menjadi salah satu basis, baik secara diskursif maupun moral-praksis, dalam menangkal arus radikalisme Islam yang mewabah saat ini.

Dalam menangkal gelombang radikalisme Islam dan terorisme, menurut Hasyim Muzadi, kuncinya adalah memperkuat pemikiran moderat di kalangan masyarakat. Pesantren dapat berperan penting di sana dengan cara menanamkan nilai-nilai moderatisme dalam model pendidikannya sehingga terjalin dialektika yang positif dan konstruktif antara keilmuan agama dengan nilai-nilai yang ada dalam

kehidupan sosial. Inti dari model pendidikan tersebut, menurut Muzadi, adalah keseimbangan antara pengajaran hukum Islam dengan legal formal, pendidikan dakwah yang responsif dengan kondisi dan psikologi masyarakat, pembinaan akhlak atau tasawuf yang dialektis dengan norma-norma masyarakat, dan penanaman nilai-nilai humanitas dan HAM. Kalau keempat hal itu disinergikan di dalam model pendidikannya, maka pesantren akan melahirkan generasi-generasi Muslim yang moderat (Muzadi, 2009).

Sejalan dengan hal itu, Abd. Rahman Assegaf berpendapat bahwa institusi pendidikan Islam, termasuk di antaranya pesantren, yang berwawasan HAM merupakan upaya preventif dalam menangani konflik dan kekerasan (Assegaf, 2004:182). Di antara butir-butir HAM yang dicetuskan dalam Deklarasi HAM 1948 dan kemudian di-Islamisasikan dalam Deklarasi Kairo 1981, terdapat hak hidup (*right to life*), hak merdeka (*right to freedom*), hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (*right to equity and prohibition against impermissible discrimination*), hak mendapat keadilan (*right to justice*), hak untuk tidak diperlakukan semena-mena (*right to fair trail*), hak memperoleh perlindungan terhadap penyimpangan kekuasaan (*right to protection against abuse of power*), hak memperoleh perlindungan terhadap siksaan (*right of protection against torture*), hak minoritas (*right to minority*), dan lain-lain. Butir-butir tersebut sering diabaikan dalam perilaku atau gerakan radikal. Karenanya, perlu adanya internalisasi atau penanaman nilai-nilai dari butir-butir HAM tersebut sejak dini melalui proses pendidikan. Di samping, dalam konteks Islam, nilai-nilai tersebut sejalan dengan *Maqashid al-Syari'ah* (substansi dan tujuan penetapan Syariat).

Dalam konteks inilah, UNESCO pada tahun 2001 mencanangkan Pendidikan Damai (*Peace education*) atau Pendidikan Budaya Damai (*Culture of Peace Education*). Program ini pertama kali dielaborasi oleh UNESCO pada saat Kongres Internasional tentang Perdamaian di Yarnoussoukro, Cote d'Ivoire, pada 1989. Tujuan program tersebut adalah untuk membentuk sistem pendidikan yang komprehensif bagi HAM, demokrasi, dan budaya damai. Oleh UNESCO, program ini dijalankan untuk semua sistem pendidikan pada jenjang yang berbeda-beda, baik pendidikan formal maupun informal (Assegaf, 2004: 85-86).

*Culture of Peace Education* juga berpijak pada Deklarasi HAM pasal 2 yang menyatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan untuk mengembangkan secara utuh kepribadian manusia dan memperkuat penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi. Pendidikan hendaknya mendorong saling pengertian, toleransi, dan persahabatan antar berbagai bangsa tanpa memandang perbedaan ras dan agama, dan hendaknya meningkatkan kegiatan PBB untuk memelihara perdamaian.

UNICEF, salah satu lembaga vital PBB yang lain, yang *concern* dalam memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak sedunia, bahkan secara proaktif telah menjadikan *Culture of Peace Education* sebagai program utamanya. Dalam Seri Lembar Kerja (*Fact Sheets*) UNICEF Juli 1999 tentang

Pendidikan Budaya Damai disebutkan bahwa dalam urusan persekolahan dan lembaga pendidikan, Pendidikan Budaya Damai dimaksudkan, di antaranya, untuk hal-hal berikut:

- (1) Berfungsi sebagai "zona damai" di mana anak-anak merasa aman dari konflik kekerasan;
- (2) Mengembangkan iklim belajar yang damai dan perilaku saling menghargai antar anggota masyarakat;
- (3) Melaksanakan hak dasar anak sebagaimana digariskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC);
- (4) Menunjukkan prinsip persamaan dan tanpa diskriminasi, baik dalam praktik maupun kebijakan administrasinya;
- (5) Menjabarkan pengetahuan tentang bentuk perdamaian yang ada di tengah masyarakat, termasuk berbagai sarana yang menyangkut adanya konflik, secara efektif, tanpa kekerasan, dan berakar dari budaya lokal;
- (6) Menangani konflik dengan cara menghormati hak dan martabat pihak yang terlibat;
- (7) Memadukan pemahaman tentang damai, HAM, keadilan sosial, dan berbagai isu global melalui sarana kurikulum, bila hal itu dipandang memungkinkan;
- (8) Menyediakan forum diskusi tentang nilai damai dan keadilan sosial;
- (9) Memanfaatkan metode belajar-mengajar yang menekankan pada partisipasi, *problem solving*, dan lainnya yang dapat menghargai perbedaan;
- (10) Memberdayakan anak agar dapat mengamalkan perilaku damai dalam lingkungan pendidikan dan di masyarakat pada umumnya;
- (11) Memperluas kesempatan untuk melakukan refleksi berkelanjutan dan pengembangan keahlian semua pendidik sehubungan dengan isu perdamaian, keadilan, dan hak-hak seseorang (Assegaf, 2004: 66-67).

Pesantren sebenarnya sangat strategis untuk ikut berperan dalam program *Culture of Peace Education* tersebut. Sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pada pendidikan karakter dan moralitas, pesantren justru dapat menjadi pusat persemaian generasi-generasi Muslim yang cinta damai, moderat, dan anti kekerasan. Karakter otentik pesantren Indonesia, khususnya pesantren tradisional, dikenal sangat ramah, toleran, berbaur dengan masyarakat, kaya dengan kearifan lokal, dan jauh dari budaya dan ideologi radikal. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam *Peace Education*.

### **Epilog**

Urgensi model pendidikan toleran dan inklusif berbasis konsep *Culture of Peace Education* dalam konteks pendidikan pesantren ini, setidaknya, dapat diuraikan ke dalam beberapa poin berikut.

*Pertama*, sebagai bentuk pengembangan kurikulum pendidikan pesantren yang lebih moderat, humanis, toleran, inklusif, dan transformatif terhadap problematika sosial yang sedang berkembang.

*Kedua*, dengan mengembangkan model pendidikan toleran dan inklusif berbasis konsep *Culture of Peace Education*, pesantren akan dapat merevitalisasi watak dan karakternya yang *genuine*—yang sebelumnya dikenal sangat ramah, moderat, dan anti-kekerasan.

*Ketiga*, pesantren dapat menghidupkan dan menampilkan wajah Islam yang sejati sebagai *"din al-salam"* (agama perdamaian), yang sama sekali jauh dari ajaran-ajaran dan praktik-praktik radikalisme dan terorisme—sebagaimana yang dituduhkan oleh dunia Barat selama ini.

*Keempat*, stigma negatif pesantren sebagai pusat pembibitan teroris secara tidak langsung terbantahkan, dan dunia akan dapat memandang lembaga pendidikan pesantren secara proporsional sesuai dengan wajah aslinya yang cinta damai, dan bukan suatu hal yang mustahil bahwa hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi lembaga pendidikan yang lain, baik dalam level nasional maupun internasional, untuk mengadopsi model pendidikan pesantren guna menciptakan dunia yang lebih damai dan kondusif.

*Kelima*, turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda pemerintah guna mewujudkan kehidupan nasional yang stabil, tenteram, dan aman dari ancaman radikalisme dan terorisme yang didorong oleh penafsiran dan pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama (baca: jihad).

#### **Daftar Rujukan**

- Asfar, Muhammad. 2003. *"Agama, Islam, Pesantren, dan Terorisme"*, dalam Muhammad Asfar, *et. al. Islam Lunak, Islam radikal: Pesantren, Terorisme, dan Bom Bali*. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM (Pusdeham) dan JP Press.
- Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Bruinessen, Martin Van. 1995. *Kitab Kuning dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Daily Telegraph. 4/10/2003. *Teaching Anti-Terror Lessons*.
- Dale, Stephen Frederic. 1998. *"Religious Suicide in Islamic Asia: Anticolonial Terrorism in India, Indonesia, and the Phillipines," The Journal of Conflict Resolution*.
- Irhamni dan Adib, Khoirul. 2009. *Pemaknaan Fikih Toleransi dalam Konstruksi Sosial Kyai Sholeh Bahruddin Sebagai Dasar Pengembangan Model Integrasi Sosial dan Harmoni Lintas Agama di Tengah Pluralitas Keberagamaan Masyarakat Jawa Timur*. Laporan penelitian belum diterbitkan.
- Jean, Peter. 5/10/2003. *"Australia may Fight Terror through Indonesian School," dalam Associated Australian Press*.
- Jones, Sidney. 5/5/2006. *"Terorisme di Indonesia: Jaringan Nordin Top"*, dalam *International Crisis Group*.
- , 8/8/2002. *"Al-Qaeda in Southeast Asia: the Case of 'Ngruki Network' in Indonesia*. International Crisis Group.
- Muzadi, Hasyim. Desember 2009. *"Menangkal Terorisme dengan Memberdayakan Pemikiran Moderat"*, dalam *Tabloid Diplomasi*.
- Powell, Sian dan Nahdar, Sandra. 4/10/2003. *"Warning on Closing Islamic School," dalam the Australian*.
- Purwoko, Dwi. 2002, *Islam Konstitusional dan Islam Radikal*. Jakarta: Permata Artistika Kreasi.
- Rahmat, M. Imdadun. 2005. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam ke Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Republika. Edisi 06/08/2010. *"Ormas Islam Tolak Radikalisme Mengatasnamakan Agama"*.
- Turmudi, Endang. *et. al.* 1995. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Zada, Khamami. 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

-----, 2007. *Melacak Radikalisme dan Liberalisme Pesantren*.  
<http://khamamizada.multiply.com/journal/item/6>.